

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Desa Pringsurat dalam pengelolaan Keuangan Desa Pringsurat
 - a. sebagai lembaga esksekutif pelaksana pengelolaan keuangan desa antara lain:
 - 1) Tahap Perencanaan: menyusun dan menetapkan Peraturan Desa terkait RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDesa Pringsurat.
 - 2) Tahap Pelaksanaan: melaksanakan Penerimaan Pendapatan pada APBDesa; Pengeluaran/Belanja pada APBDesa; dan Pelaksanaan Pembiayaan pada APBDesa selama tahun anggaran berjalan.
 - 3) Tahap Penatausahaan: melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam Buku Kas Umum dan Buku Bank.
 - 4) Tahap Pelaporan: pelaporan berkala tiap bulan dari Bendahara Desa kepada Kepala Desa.
 - 5) Tahap Pertanggungjawaban: menyusun laporan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban APBDesa untuk dibahas dengan BPD dan Masyarakat Desa Pringsurat dalam Musyawarah Desa;

menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDesa bersama BPD Pringsurat, dan menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa kepada Bupati melalui Camat.

- b. Pemerintah Desa Pringsurat melakukan *freies ermessen* atau kemerdekaan bertindak untuk bertindak dalam mengatasi permasalahan kekosongan jabatan Sekretaris Desa Pringsurat dengan melakukan pengisian jabatan Sekretaris Desa oleh pelaksana tugas agar penyelenggaraan pemerintahan dapat terselenggara dengan baik, termasuk dapat mengelola Keuangan Desa Pringsurat dengan baik sesuai *Good Local Governance and Good Local Government*, meskipun ternyata hal ini tidak cukup efektif karena terjadi penumpukan beban kerja dari pelaksana tugas tersebut.
2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Pringsurat dalam pengelolaan Keuangan Desa Pringsurat:
- a. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan pengelolaan Keuangan Desa Pringsurat; dan
 - b. Kekosongan jabatan Sekretaris Desa Pringsurat yang dilakukan tindakan *freies ermessen* tidak berjalan efektif dengan pengisian oleh pelaksana tugas Sekretaris Desa sehingga terjadi penumpukan beban kerja Perangkat Desa Pringsurat dan perbedaan struktur PTPKD dalam pengelolaan Keuangan Desa Pringsurat.

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah Desa Pringsurat melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Pringsurat agar terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pringsurat terutama pengelolaan Keuangan Desa Pringsurat.
2. Sebaiknya dilakukan pengangkatan pejabat tetap Sekretaris Desa Pringsurat bukan sekadar pelaksan tugas Sekretaris Desa, sehingga penyelenggaraan pemerintahan termasuk pengelolaan Keuangan Desa Pringsurat dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pringsurat dapat mewujudkan *Good Local Governance and Good Local Government*.